

PENGARUH PEMAHAMAN PENGELOLAAN KEUANGAN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE

Maria Apriliana Anita Mbejo¹, Falentina Lucia Banda², Sabra B. Wahab Thalib³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi**

^{1,2,3}Universitas Flores

Email: anitambejo@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the effect of understanding the financial management of the regional financial accounting system on the performance of the Ende Regency Regional Government. The population in this study was the Head of Section, Secretary and Treasurer for Finance, totaling 159. The sampling technique used purposive sampling, namely the Head of Section, Secretary and Treasurer for Finance in SKPD Ende Regency, totaling 60 people. This type of research uses the type of causality research. This study uses primary data, namely a questionnaire. Data were analyzed using multiple regression analysis which was processed through 1MB SPSS Statistikcever 25. The results of this study indicate that: (1) Understanding of financial management has a significant positive effect on the performance of the local government of Ende Regency. This can be shown by the coefficient value of the variable understanding of financial management of 0.202 with $t_{count} > t_{table}$ ($4.808 > 2.202$) and a significant level of understanding of financial management is $0.000 < 0.05$. (2) The regional financial accounting system has a significant positive effect on the performance of the local government of Ende Regency. This can be shown by the variable coefficient of the regional financial accounting system of 2.239 with $t_{count} > t_{table}$ ($2.239 > 2.002$) and the significant level of the regional financial accounting system is $0.029 < 0.05$. Simultaneously, the variable understanding of financial management and regional financial accounting systems on local government performance is 29.4 while the remaining 70.6% is influenced by other variables not included in the study.

Keywords: *Understanding of Financial Management, Regional Financial Accounting Systems and Regional Government Performance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman pengelolaan keuangan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Populasi dalam penelitian ini Kepala Bagian, Sekretaris, dan Bendahara Bidang Keuangan yang berjumlah 159. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu Kepala Bagian, Sekretaris, dan Bendahara Bidang Keuangan di SKPD Kabupaten Ende yang berjumlah 60 orang. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kausalitas. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Data di analisis menggunakan analisis regresi berganda yang pengolahannya melalui 1MB SPSS Statistikcever 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pemahaman pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ende. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel pemahaman pengelolaan keuangan sebesar 0,202 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,808 > 2,202$) dan tingkat signifikan pemahaman pengelolaan keuangan $0,000 < 0,05$. (2) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ende. Hal ini dapat ditunjukkan oleh koefisien variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 2,239 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,239 > 2,002$) dan tingkat signifikan sistem akuntansi keuangan daerah $0,029 < 0,05$. Secara (Simultan) variabel pemahaman pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 29,4 sedangkan sisanya 70,6% Sedangkan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Kata kunci: Pemahaman Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat (Ratih, 2018). Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat (Nuraeni et al., 2018). Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh glabalisasi yang menuntut adanya keterbukaan, maka pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah semakin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (Halim et al., 2018).

Dalam pelaksanaanya sebagai bagian dari pemenuhan amanat pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri setiap tahun harus mengeluarkan pedoman penyusunan APBD. Sebagai contoh untuk pedoman APBD tahun 2014 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Dalam Pemendagri ini antara lain disebutkan bahwa penyusunan APBD memiliki prinsip yang perlu dipatuhi oleh Pemerintah Daerah yakni sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya, tepat waktu sesuai drngan tahapan dan jadwal yang lebih ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD, partisipatif dengan melibatkan masyarakat, memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya (Jusnaini, 2019)

Menurut (Dewi, 2014) Pemahaman Pengelolaan keuangan daerah adalah orang yang pandai dan mengerti tentang proses akuntansi dibuat sehingga menjadi laporan keuangan yang benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan yang telah ditetapkan dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar akuntansi pemerintah dibutuhkan dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ Tahun 2005 tentang keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparansi Tahun 2005 tentang keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan APBD yang meliputi realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah selama ini diatur dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) tentang keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaanya maka disusunlah (peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019) tentang pengelolaan daerah. Penyempurnaan peraturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3(tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah Akuntabilitas, Transparansi, dan partisipatif(Muryati,

2018). (Astuti, 2018) bahwa pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ruang lingkup keuangan daerah yang terdiri atas pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain dikuasai oleh pemerintah daerah (Maulidah et., 2017).

Adanya keterlibatan pemakai dalam menjalankan sistem informasi yang diterapkan pada pemerintah daerah berupa sistem informasi manajemen daerah yang merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah yang dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 323)

Data sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien sangatlah penting untuk menghindari adanya dan penyelewengan baik siklus pencatatan yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah yang menggambarkan setiap tahapan dalam proses yang dilakukan. Akuntansi yang dilaporkan dalam sistem akuntansi keuangan daerah dikaitkan dengan data non finansial seperti data statistik memungkinkan instansi pemerintah untuk menilai efisiensi, sejauh mana sumberdaya yang telah dimanfaatkan secara ekonomis dan penilaian efektivitas suatu instansi tersebut mampu memberikan pelayanan maksimum kepada masyarakat dengan sumber daya yang tersedia termasuk nilai apakah hasil program dapat mencapai konsekuensi-konsekuensi yang dituju (Sari, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh (Ratih, 2018) tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah untuk menunjang dan memperkuat kinerja perlu dilakukan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ditegaskan dalam permendagri No. 13 tahun 2006 bab X1` pasal 232 ayat 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menentukan sistem akuntansi keuangan daerah atau SAKD adalah seringkali prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Hidayat, 2015).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran visi dan misi organisasi dalam perumusan skema strategi organisasi, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi daerah dalam periode tertentu (Halim et al, 2018). Pengukuran kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat penting, karena pengukuran kinerja instansi pemerintah

dimaksudkan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan masyarakat luas

Tujuan pemerintah daerah adalah memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan *good governance* serta memberikan pelayanan publik. Berkaitan dengan kinerja pelayanan publik, (Ramandei, 2019) menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, memberikan pelayanan yang baik, biaya murah, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu, dan memberikan kepuasan kepada publik sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat.

Hasil penelitian (Halim et al, 2018) menyatakan bahwa pemahaman pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2015) hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurut hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh (Ratih, 2018) Menunjukkan bahwa Pemahaman pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah dan hasil penelitian dari (Nuraeni et al., 2018) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasaruddin, 2018) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah penelitian dari (Hidayat, 2015) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

(Dewi, 2014) Menunjukkan bahwa pemahaman pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah penelitian yang dilakukan oleh (Halim et al., 2018) Menunjukkan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2018) menunjukkan Sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

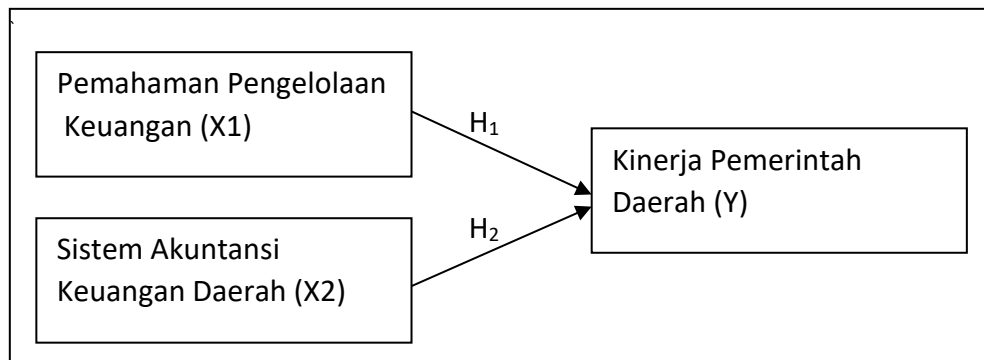
Berdasarkan perbedaan hasil penelitian pada tabel 1.1 maka peneliti akan melakukan penelitian ulang di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende. Alasan sehingga peneliti melakukan penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende, karena berdasarkan opini dari BPK RI dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Sebagai Pemerintah Kabupaten ini merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Ende karena dapat mempertahankan opininya dari tahun 2020-2022. Walaupun menyandang opininya WTP namun masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Ende, diantaranya kesalahan klasifikasi realisasi penganggaran atas belanja modal serta belanja barang dan jasa, peraturan daerah terkait retribusi persetujuan bangun gedung belum ditetapkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib, (<https://ntt.bpk.go.id>). Dengan masalah yang ada, dapat menunjukkan bahwa kinerja pegawai pengelola keuangan di setiap SKPD yang ada di Kabupaten Ende belum maksimal. Peneliti ingin mengkaji kembali Pengaruh Pemahaman Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.

HIPOTESIS

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini

terdapat tiga variabel adalah Pemahaman Pengelolaan Keuangan (X1), Sistem Akuntansi Keuangan (X2), dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) untuk lebih jelasnya digambarkan Kerangka Berpikir seperti dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



H₁: Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

H₂: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Di lihat dari tingkat atau eksplanasi, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kasualitas. Menurut (Sugiyono, 2018) hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini terdapat variabel independen(variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang di pengaruhi) sampel adalah bagian dari populasi (Sebagian atau wakil populasi yang di teliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan di ambil berasal dari sumber yang disengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2018). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : Kepala Bagian SKPD, Sekretaris SKPD, dan Bendahara SKPD yang berada di dalam Kota Kabupaten Ende. Peneliti tidak mengambil sampel di luar kota karena keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian.

Menurut (Ghozali, 2018) analisis regresi berganda adalah teknik analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel terkait. Adapun persamaan regresi berganda dalam penelitian ini antara lain:

$$Y = a + b_1X + B_2 X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

a = Konstanta

X1 = Pemahaman pengelolaan keuangan daerah

X2 = Sistem Akuntansi Keuangan

β1-3 = Koefisien regresi

e = eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif dari suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Statistik deskriptif didasarkan pada jawaban responden yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Teoritis	Mean Aktual	Standar Deviasi
Pemahaman P engelolaan Keuangan (X1)	7-34	14-34	20,5	24,72	4,892
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	10-43	18-43	26,5	32,65	5,268
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	10-47	20-47	28,5	38,52	4,728

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman Pengelolaan Keuangan (X1), nilai mean aktual adalah 24,72. Nilai mean ini lebih besar dari nilai mean teoritis (20,5). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Pengelolaan Keuangan dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), nilai mean aktual adalah 32,65. Nilai mean aktual ini lebih besar dari nilai mean teoritis (26,5). Hal ini mengindikasikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
3. Kinerja Pemerintah Daerah (Y) nilai mean aktual adalah 38,52. Nilai mean aktual ini lebih besar dari nilai mean teoritis (28,5). Hal ini mengindikasikan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sangat diperlukan.

Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh Pemahaman Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan analisis regresi linier berganda. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

a = Konstanta

B = Koefesien Regresi

X1 = Pemahaman Pengelolaan Keuangan

X2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Tabel 4.9 Hasi Uji Koefisien Regresi

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Sign.
Constanta	17,353		
Pemahaman Pengelolaan Keuangan	0,545	4,808	0,000
Sistem Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,236	2,239	0,029

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

a. Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda yang ditunjukkan tabel diatas, maka persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 17,353 + 0,545X_1 + 0,236X_2$$

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yaitu pemahaman pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah (Gozhali,2011:84). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan nilai F hitung terhadap F tabel maka model yang dirumuskan sudah tepat. Jika nilai F hitung > F tabel maka dapat di artikan bahwa model regresi sudah tepat, artinya berpengaruh secara bersama-sama dengan melihat nilai F tabel = $f(k; n-k)$, $f(2;60-2)$, F tabel (2;58) = 3,16.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan f_{hitung} dengan f_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak

Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_o diterima

Tabel 4.10 Hasil Uji F

Fhitung	Ftabel	Signifikan
11,850	3,16	0,000

Sumber : olahan peneliti, 2023

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas dapat dilihat pada nilai F hitung sebesar dengan nilai F tabel adalah 3,16 sehingga nilai F hitung > F tabel atau 11, 850 > 3,16 dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Dapat di simpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel Pemahaman Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen yaitu pemahaman pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah (Gozhali,2011:84). Uji ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_o diterima

Dari jumlah sampel sebanyak 60 dengan pengujian dua sisi, jumlah variabel independennya sebanyak dua atau $k=2$ maka derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=60-2-1=57$ sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 2,002.

Tabel 4.11 Hasil Uji T

		Un & Std Coefficients (Beta)	t-hitung	simbol	t-tabel	pvalue
Kausalitas (constant)		17,353				
std. Error		5,099				
Pemahaman Pengelolaan Keuangan (X1)	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)		4,808	>	2,002	0,000

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)		2,239	>	2,002	0,029
---------------------------------------	-------------------------------	--	-------	---	-------	-------

Sumber : olahan peneliti, 2023

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah mempunyai nilai t-hitung = 4,808 > 2,002 sehingga (H1) hipotesis pertama yang diajukan yaitu Pemahaman Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dinyatakan terbukti atau dapat diterima, hal ini dapat dilihat pada nilai t-hitung < t-tabel. Pada hipotesis kedua (H2) yang diajukan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dilihat dari nilai t-hitung = 2,239 > 2,002 sehingga (H2) dinyatakan terbukti atau dapat diterima. Berdasarkan penjelasan terhadap hasil tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Kriteria pengujian uji t pada tabel diatas t hitung Pemahaman Pengelolaan Keuangan sebesar 4,808 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas = 57 maka diperoleh t tabel = 2,002. Nilai t hitung 4,808 > t tabel 2,002 pada tingkat kekeliruan 5%. Nilai koefisien regresi variable Pemahaman Pengelolaan Keuangan adalah 0.057.
2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Kriteria pengujian uji t pada tabel diatas t-hitung Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 2,239 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha=0,05$) dan derajat bebas = 57 maka diperoleh t tabel = 2,002. Nilai t hitung 2,239 > t tabel 2,002 pada tingkat kekeliruan 5%. Nilai koefisien regresi variabel Sanksi perpajakan adalah 0.207.

Pembahasan

Pemahaman Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Kriteria pengujian uji t pada tabel diatas t hitung Pemahaman Pengelolaan Keuangan sebesar 4,808 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas = 57 maka diperoleh t tabel = 2,002. Nilai t hitung 4,808 > t tabel 2,002 pada tingkat kekeliruan 5%. Nilai koefisien regresi variable Pemahaman Pengelolaan Keuangan adalah 0.057.

Pemahaman Pengelolaan keuangan daerah adalah orang yang pandai dan mengerti tentang proses akuntansi dibuat sehingga menjadi laporan keuangan yang benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan yang telah ditetapkan dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Adanya keterlibatan pemakai dalam menjalankan sistem informasi yang diterapkan pada pemerintah daerah berupa sistem informasi manajemen daerah yang merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah yang dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.

Hasil penelian ini sejalan dengan penelitian yanag dilakukan oleh (Halim et al, 2018) menyatakan bahwa pemahaman pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti,2018) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Kriteria pengujian uji t pada tabel diatas t-hitung Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 2,239 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha=0,05$) dan derajat bebas = 57 maka diperoleh t tabel = 2,002. Nilai t hitung 2,239 > t tabel 2,002 pada tingkat kekeliruan 5%. Nilai koefisien regresi variabel Sanksi perpajakan adalah 0.207.

Sistem akuntansi keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah untuk menunjang dan memperkuat kinerja perlu dilakukan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ditegaskan dalam permendagri No. 13 tahun 2006 bab X1` pasal 232 ayat 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menentukan sistem akuntansi keuangan daerah atau SAKD adalah seringkali prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2015) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian yang tidak mendukung penelitian ini adalah Faradila Pratiwiningtyas dan Adi Prasetyo (2018) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi

R Square	Adjusted R Square
0,294	0,269

Sumber : olahan peneliti, 2023

Berdasarkan tabel besarnya R Square dianalisis menggunakan SPSS versi 25 diperoleh sebesar 0,294 atau 29,4%. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan variabel Pemahaman Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 29,4%. Sedangkan sisanya sebesar 70,6% adalah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil ini dibuktikan dengan t hitung Pemahaman Pengelolaan Keuangan sebesar 4,808 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas = 57 maka diperoleh t tabel = 2,002. Nilai t hitung 4,808 > t tabel 2,002 pada tingkat kekeliruan 5%. Nilai koefisien regresi variable Pemahaman Pengelolaan Keuangan adalah 0.057. artinya semakin baik pemahaman pengelolaan keuangan maka akan meningkat terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil ini dibuktikan dengan uji t pada tabel diatas t-hitung Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 2,239 dan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05. Nilai t tabel dengan ($\alpha=0,05$) dan derajat bebas = 57 maka diperoleh t tabel = 2,002. Nilai t hitung 2,239 > t tabel 2,002 pada tingkat kekeliruan 5%. Nilai koefisien regresi variabel Sanksi perpajakan adalah 0.207. artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola maka akan meningkat kinerja pemerintah daerah.

REFERENSI

- Astuti, M. T. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu. *Skripsi, Brawijaya Malang*, 108.
- Bastian, I. (2016). *Buku Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar* (p. 216). PT. Erlangga, Jakarta.
- Bodnar, G. H., & Hopwood., W. S. (2018). *Buku 1 Sistem Informasi Akuntansi Edisi 6*. Salemba Empat, Jakarta.
- Dewi, A. K. (2014). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau). *Politeknik Senggarang*, 1(1), 20.
- Fahmi, I. (2015). *Buku Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi* (p. 115). Alfabeta, Bandung.
- Ghozali, I. (2018). *Buku Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, H. A., Nangoi, G. B., & Kalangi, L. (2018). Pengaruh Pemahaman Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Efektivitas Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Universitas Sam Ratulangi*, 1(1), 140–150.
- Hidayat, R. (2015). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 20.
- Mahmudi. (2018). *Buku Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Buku Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. CV. Andi Offset.
- Maryati, S. (2018). Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu. *Skripsi Unib*, 1(1), 120.
- Maulidah, Iswahyudi, & N, D. (2017). *Buku Akuntansi Pemerintahan* (p. 327). Salemba Empat, Jakarta.

- Nasaruddin, F. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi Pada Bank Negara Indonesia Tbk. *Jurnal Ichsan Gorontalo*, 3(1), 20.
- Nuraeni, Titi, & Abdul. (2018). Model Pengelolaan Keuangan Instansi Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 20.
- Peraturan Pemerintah. (2005). Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jakarta*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Nomor 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jakarta*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jakarta*.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi DIY. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2), 14–28.
- Ramandei, P. (2019). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura). *Diss. Diponegoro University*, 1(1), 20.
- Ratih, A. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 1(1), 20.
- Sari, E. (2019). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolakeuangan Daerah*. 3, 249–260.
- Sugiyono, P. D. (2018). Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).